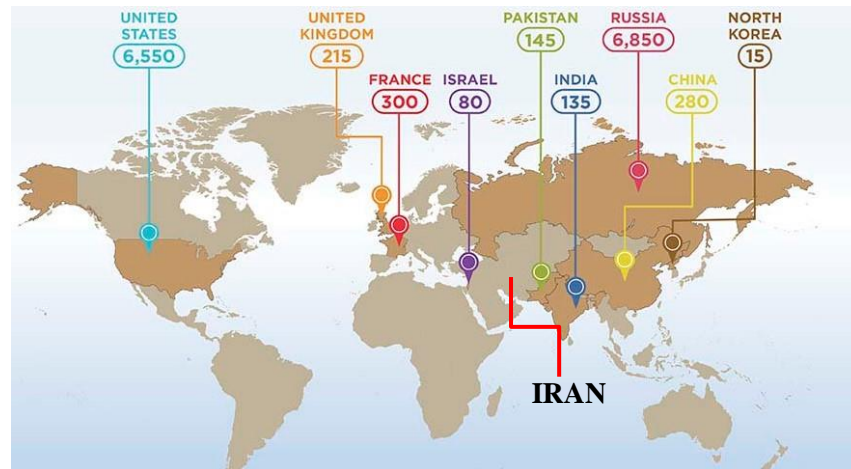


BAB II

KEPUTUSAN AS MENARIK DIRI DARI JCPOA

Lokasi geografis Iran yang dikelilingi oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir seperti Rusia, Pakistan, India dan Israel menyebabkan posisi Iran secara geopolitik¹ menjadi sangat rentan. Hal tersebut menyebabkan Iran berusaha untuk mengimbangi kekuatan nuklir negara-negara yang ada di sekitarnya sebagai langkah untuk melakukan pencegahan. (Amirahmadi, 2008; Saïd, 2016) Terlepas dari aspek geopolitik, menyoroiti hubungan Iran dan AS yang sejak lama tidak harmonis ditambah lagi dengan pengalaman negatif Iran dengan komunitas internasional ketika Iran menjadi negara yang terisolasi juga menyebabkan Iran berusaha melindungi kepentingannya sendiri dan mempertahankan diri melawan musuh tanpa bantuan internasional.

Gambar 2.2 Peta Lokasi Geografis Iran



Sumber : armscontrol.org

Gambaran diatas memberikan sedikit informasi mengenai motivasi Iran untuk melakukan pengembangan senjata nuklir, selanjutnya Bab ini akan memuat penjelasan mengenai kesepakatan nuklir Iran, perjalanan implementasi kesepakatan dan respons AS terkait kesepakatan dan permasalahan yang muncul dibawah administrasi Trump.

¹ Geopolitik adalah keterkaitan antara kekuatan politik dan aspek geografis (lokasi, luas dan sumber daya yang dimiliki) yang mempengaruhi hubungan antar negara. (newworldencyclopedia.org/entry/Geopolitics)

2.1 Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA)

Republik Islam Iran diproklamasikan secara resmi di Teheran pada tanggal 1 April 1979. Revolusi yang terjadi di Iran menyebabkan situasi geopolitik mengalami perubahan karena adanya pergantian kepemimpinan di Iran. Naiknya Ayatollah Ruhollah Khomeini sebagai pemimpin baru Iran membuat AS terkejut dan merasa kehilangan teman lama serta sekutu strategisnya di Timur Tengah. (Chipman, 2005; Kinzer, 2008; Saïd, 2016)

Jika ditarik jauh kebelakang, selama perang dingin ketika terjadi perlombaan senjata nuklir yang meningkat antara AS dan Uni Soviet, banyak negara-negara yang juga ingin memanfaatkan energi nuklir sebagai alat pertahanan negara termasuk Iran. Mengacu pada hal tersebut AS kemudian mencegah proliferasi² nuklir dengan melarang negara-negara yang bukan sekutu AS untuk memiliki senjata nuklir.

“nonproliferation enterprise has been a political, legal, and diplomatic framework aimed at establishing a norm against WMD acquisition, reducing incentives to proliferate, and restricting access to critical technologies.” (Paul I. Bernstein, 2006; Saïd, 2016)

Iran sebagai hegemon regional tidak bisa mengabaikan status nuklir negara-negara di sekitarnya seperti Israel dan India. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Iran tujuan nuklir yang bersifat militer memang dibutuhkan demi kelangsungan hidup bangsa Iran. Pemimpin Iran ingin menemukan cara untuk dapat mempertahankan negaranya dari ancaman nuklir potensial. AS dalam upaya mempertahankan pengaruhnya dikawasan Timur Tengah mulai melihat Iran sebagai ancaman. Sejak saat itu tindakan kedua negara terhadap satu sama lain didasarkan pada kemarahan dan kebencian yang kemudian membantu menumbuhkan suasana konflik kedua negara.

Pengalaman negatif dengan komunitas internasional juga dapat memengaruhi kepercayaan Iran terhadap kemampuan norma dan rezim internasional untuk melindungi kepentingannya, atau mempertahankannya

² Proliferasi Nuklir adalah istilah yang menggambarkan penyebaran senjata nuklir dan teknologi serta informasi terkait pengembangan senjata nuklir ke negara-negara yang tidak diakui sebagai "Nuclear Weapon States" yang dimuat dalam Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) (<https://definitions.uslegal.com/n/nuclear-proliferation/>)

dari pelanggar, sehingga membuatnya cenderung menolak kepatuhan terhadap rezim atau norma semacam itu. Oleh karena itu, Iran mungkin telah melihat tenaga nuklir sebagai alat kompensasi untuk kelemahan dan isolasi militernya, sehingga berpotensi bersedia melanggar kewajiban NPT. (Kartchner, 2006; Saïd, 2016)

Pada tahun 2002 hubungan Iran dengan AS semakin memburuk ketika Presiden George W. Bush dalam pidatonya menggambarkan Iran (bersama Korea Utara dan Irak) sebagai "*Axis of Evil*", dengan tuduhan sebagai negara yang mendukung terorisme dan proliferasi senjata pemusnah masal. Pidato "*Axis of Evil*" Bush membuat Iran merasa terancam dan menyebabkan munculnya banyak prasangka diplomatik terutama setelah AS menginvasi salah satu negara '*Axis of Evil*', dua lainnya (Iran dan Korea Utara) merasa perlu untuk memiliki senjata nuklir.

Iran dianggap tidak pernah menghentikan pengayaan uraniumnya, laporan dari IAEA pada tahun 2006 kepada Dewan Keamanan PBB, mengungkapkan bahwa Iran menyembunyikan beberapa kegiatan pengayaan uraniumnya selama lebih dari dua puluh tahun dan telah ditarik dari kewajibannya di bawah NPT. Dewan Keamanan meminta Iran untuk menunda pengayaan uraniumnya tetapi negara itu melanjutkan program nuklirnya karena mereka menolak tuduhan tersebut. Hal ini menyebabkan dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran (ElBaradei, 2006; Jafarzadeh, 2002; Poitevin, 2007; Saïd, 2016)

Tahun 2010 sampai dengan awal 2013 terjadi peningkatan sanksi terhadap Iran dan pembicaraan antara P5+1 (AS, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, Jerman) dengan Iran terhambat. Oktober 2010, P5+1 kembali mengundang Iran untuk membahas program nuklirnya, tetapi tidak menerima permintaan Iran yang meminta Turki atau Brasil untuk turut hadir dalam perundingan. (Rozen, 2010) Pembicaraan dilanjutkan pada 6 Desember 2010 di Jenewa, dimana P5 +1 meminta jaminan bahwa program nuklir Iran tetap bertujuan damai dan Iran meminta agar sanksi internasional dicabut. (Sadjadpour, 2010) Perundingan selanjutnya dilakukan di Istanbul, Turki

pada akhir Januari 2011. Pembicaraan kembali terhenti karena desakan Iran yang meminta pencabutan semua sanksi ekonomi sebagai prasyarat untuk diskusi substantif mengenai program nuklirnya. (Erlanger, 2011)

13 Juli 2011, menteri luar negeri Rusia, Sergey Lavrov mengusulkan pendekatan bertahap untuk menangani perselisihan nuklir dengan Iran. Di bawah proposal Rusia, kerja sama Iran dengan IAEA akan dipenuhi dengan langkah-langkah dari P5+1 yang memberikan timbal balik keuntungan kepada Iran. Iran awalnya menyambut rencana Rusia, tetapi Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis tidak menerima gagasan pencabutan sanksi pada tahap awal. Negosiasi kembali dilakukan pada Juni 2012 di Moskow, para pihak yang terlibat tidak mengubah posisi mereka dari pandangan sebelumnya, tetapi dalam negosiasi ini terdapat usulan Iran mengenai pengakuan hak Iran untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai; pencabutan sanksi sebagai imbalan atas kerja sama Iran dengan IAEA; kerja sama dalam bidang energi nuklir dan keselamatan nuklir; memungkinkan batas maksimal pengayaan sampai dengan 20%; dan beberapa masalah non-nuklir. Akan tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai sampai akhir 2012. (Nuclear Threat Initiative, 2018)

Kemenangan Hassan Rouhani dalam pemilihan presiden Iran pada Juni 2013 membawa membawa konsekuensi pada perubahan posisi Iran dalam proses negosiasi nuklir. (telegraph.co.uk, 2013) Dalam pidatonya, Presiden Rouhani, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala perunding nuklir Iran sejak tahun 2003 hingga 2005, memprioritaskan "peningkatan posisi Iran berdasarkan kepentingan nasional dan pencabutan sanksi opresif", hal tersebut mengindikasikan keinginannya untuk membawa Iran melanjutkan negosiasi dengan negara P5+1. (Nuclear Threat Initiative, 2018)

Perubahan posisi Iran dalam negosiasi nuklir membawa sedikit kemajuan dimana negosiasi nuklir Iran kembali dibuka. Pada tanggal 24 November 2013, Iran dan P5+1 mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan tentang *Joint Plan of Action (JPOA)*. Selain itu, IAEA dan Iran menyepakati Kerangka Kerja Sama (*Framework for Cooperation*)

yang mengikat kedua belah pihak untuk bekerja sama lebih lanjut sehubungan dengan kegiatan verifikasi yang akan dilakukan oleh IAEA untuk menyelesaikan semua masalah saat ini dan permasalahan yang telah lalu. (Salinas, 2015)

Iran memandang rute diplomatik sebagai solusi yang lebih menarik karena melalui proses tersebut Iran akan mendapat keringanan sanksi ekonomi yang merupakan bagian penting dari rencana Iran, dan karena Iran cenderung berusaha untuk menghindari konflik. Dengan berpartisipasi dalam negosiasi nuklir bagi Iran akan membuat negara aman dari serangan eksternal selama jalan diplomasi tersebut berlaku. Atas dasar itulah maka pada 14 Juli 2015 Iran dan Negara P5 +1 menandatangani sebuah perjanjian nuklir yang dikenal dengan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*.

Proses penandatanganan JCPOA mengalami pertentangan di pemerintahan AS maupun Iran, meski demikian penandatanganan tetap dilakukan. (Sharafedin, 2015) Selanjutnya 20 Juli 2015, Dewan Keamanan PBB mengadopsi UNSCR 2231 sebagai payung legitimasi untuk mendukung rencana tersebut. (United Nations, 2015) (Nuclear Threat Initiative, 2018)

Dalam JCPOA Iran setuju untuk membatasi pengayaan uraniumnya setidaknya selama sepuluh tahun kedepan. JCPOA dirancang untuk menghalau Iran memiliki senjata nuklir. (David Sanger, 2015) Kesepakatan ini mulai diimplementasikan dengan melakukan beberapa langkah pembatasan kemampuan Iran untuk memperkaya uranium:

1. JCPOA mengharuskan Iran mengurangi sentrifugal operasional di fasilitas pengayaan Natanz dari 19.000 menjadi 5.060 dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2025. (Institute of Science and International Studies, 2015)
2. Fasilitas pengayaan di Fordow dikonversi menjadi fasilitas penelitian dan pengembangan, dan Iran diharuskan untuk tidak meningkatkan kepemilikan uranium dalam jangka waktu sampai

dengan 15 tahun, sementara itu sentrifugal nuklir yang dimiliki Iran harus dikurangi menjadi dua rangkaian dengan total 1.044 mesin.

3. Iran setuju untuk meratifikasi Protokol Tambahan, di samping perjanjian perlindungan komprehensif, dan memberlakukan langkah-langkah inspeksi yang akan memungkinkan akses bagi pemeriksa IAEA yang belum pernah terjadi sebelumnya ke fasilitas nuklir Iran.
4. Iran menandatangani perjanjian "Roadmap untuk Klarifikasi Isu Masa Lalu dan Sekarang" dengan IAEA untuk menyelesaikan setiap pertanyaan yang masih dimiliki dan *possible military dimension* (PMD) yang mungkin dari program nuklirnya. Masalah ini dilaporkan telah diselesaikan oleh Direktur Jenderal IAEA dalam laporannya kepada Dewan Gubernur pada 15 Desember 2015. (Washington Post, 2015)
5. Untuk mengatasi kekhawatiran bahwa Iran dapat membangun dan mengoperasikan fasilitas pengayaan bawah tanah yang mirip dengan situs Natanz atau Fordow, perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk memungkinkan inspeksi secara menyeluruh pada siklus bahan bakar; hingga 25 tahun di beberapa fasilitas. Ini memungkinkan IAEA untuk memeriksa pasokan uranium Iran dari tahap penambangan melalui pembuangan limbah, dan memantau semua fasilitas produksi. (Washington Post, 2015)
6. Untuk menjamin keberlangsungan program nuklir damai milik Iran, JCPOA membentuk saluran pengadaan yang dipantau oleh komisi bersama yang akan memungkinkan Iran untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas nuklirnya di bawah pedoman rezim pasokan nuklir internasional seperti Kelompok Pemasok Nuklir (NSG) . (Washington Post, 2015)

Tabel 2.1 Ringkasan isi *Joint Comprehensive Plan of Action*

<p><i>Pengayaan Nuklir</i></p>	<p>Iran menerima untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengurangi sentrifugal nuklirnya menjadi dua pertiga selama sepuluh tahun.2. Membatasi pengayaan uranium sampai 3.67%3. Mengurangi persediaan bahan pengayaan uranium sampai 97% dalam 15 tahun4. Membongkar pusat reaktor air berat³ di Arak dan mengisinya dengan beton sehingga tidak bisa menghasilkan plutonium untuk senjata nuklir5. Berhenti membangun reaktor air berat selama 15 tahun6. Menggunakan air ringan untuk reaktor baru yang dapat mengurangi resiko proliferasi. <p>Iran diperbolehkan untuk menggunakan nuklir dengan tujuan damai.</p>
<p><i>Inspeksi dan Verifikasi</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Atom Internasional (IAEA) bertugas untuk mengontrol dan memonitor seluruh situs nuklir Iran, termasuk ekstraksi pertambangan uranium dalam kurun waktu 25 tahun dan seluruh fasilitas sentrifugal selama 20 tahun.2. Iran harus memberitahu IAEA jika ingin membangun fasilitas nuklir baru.
<p><i>Pencabutan Sanksi PBB, UE dan AS</i></p>	<p>Jika Iran menghormati komitmen di atas, sanksi berikut harus dihapus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Semua ketentuan resolusi DK PBB sebelumnya terkait dengan Iran.2. Semua sanksi terkait nuklir oleh AS dan UE (termasuk sanksi perbankan, energi, dan perdagangan).

³ Air Berat atau Deuterium Oxide (D₂O) merupakan air dengan kadar Deuterium yang tinggi digunakan sebagai bahan moderator dan sebagai pendingin reaktor.

	<p>Namun, beberapa sanksi berikut masih akan tetap berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi AS atas dukungan Iran untuk terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan kegiatan rudal. 2. Larangan perdagangan AS (tetapi barang-barang tertentu akan dibebaskan seperti ekspor pesawat sipil dan impor karpet dan bahan makanan). 3. Resolusi DK PBB baru membatasi penjualan senjata ke / dari Iran selama lima tahun dan pengembangan teknologi rudal balistik Iran selama delapan tahun.
--	---

Sumber : National Iranian American Council (2015). (Saïd, 2016)

Komitmen Iran yang kuat untuk memiliki senjata nuklir menjadi permasalahan bagi negara-negara besar. *Joint Comprehensive Plan Of Action* atau dikenal dengan Kesepakatan Nuklir Iran merupakan jalan keluar yang diambil oleh AS, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok dan Jerman dalam mengatasi polemik kepemilikan senjata nuklir Iran.

2.2 Implementasi Kesepakatan

Pada 16 Januari 2016, Direktur Jendral IAEA mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Iran mematuhi semua kewajibannya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam JCPOA. Hal ini membuka jalan bagi pelonggaran sanksi untuk Iran dengan imbalan pemberian akses bagi pemeriksa IAEA untuk melanjutkan inspeksi ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran. (IAEA, 2016) Dengan pelonggaran sanksi tersebut maka Iran kembali dapat mengekspor minyak mentah tanpa ada batasan dan memiliki akses terhadap cadangan devisa yang hampir mencapai 60 milyar dolar. Meskipun demikian sanksi sekunder yang dijatuhkan pada perusahaan asing serta sebagian besar perusahaan AS masih dipertahankan. (Saïd, 2016)

Sebelum JCPOA secara resmi ditandatangani dan diimplementasikan, Kongres AS berusaha meminta pertanggungjawaban pemerintahan Obama atas kesepakatan tersebut dengan mengeluarkan *Undang-Undang Tinjauan Perjanjian Nuklir Iran* (INARA) tahun 2015, yang mengharuskan presiden untuk menyatakan kepatuhan Iran terhadap kesepakatan bersama dengan Kongres setiap 90 hari. (Katzman, et al., 2018)

IAEA sejak tahun 2016 telah merilis verifikasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dan laporan pemantauan tentang implementasi Iran terhadap ketentuan JCPOA berdasarkan UNSCR 2231. Laporan-laporan ini secara konsisten menunjukkan kepatuhan Iran dalam mengimplementasikan JCPOA. (IAEA, 2016) meskipun demikian banyak pihak yang mengkritik laporan berkala IAEA tersebut sebab bagi mereka laporan inspeksi IAEA belum cukup membuktikan kepatuhan Iran untuk berhenti berkeinginan memiliki senjata nuklir.

Bagi Iran upaya untuk memiliki senjata nuklir juga termasuk sebuah upaya yang digunakan untuk melawan kemampuan nuklir Israel. Hal tersebut terus berlangsung sejak kedua negara memiliki hubungan yang bersifat antagonis. Sedangkan bagi Israel kesepakatan nuklir yang sudah terbentuk tidak dapat diterima berdasarkan pandangan perdana menteri Benjamin Netanyahu yang berpandangan bahwa kemungkinan Iran untuk memiliki senjata pemusnah massal merupakan ancaman besar bagi negara Israel. Israel yang memiliki ikatan yang erat dengan AS terus mengupayakan cara untuk mempengaruhi kesepakatan tersebut sampai saat ini. (Kreiter, 2015; Saïd, 2016)

Angkatan bersenjata Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Pada tanggal 8 dan 9 Maret 2016, melakukan tes rudal balistik sebagai bagian dari latihan militernya dan pada bulan yang sama Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Iran dan Inggris yang terlibat dalam program rudal balistik tersebut. Adam J. Szubin, Penjabat *Secretary for Terrorism and Financial Intelligence* menyatakan:

“Iran’s ballistic missile program and its support for terrorism pose a continuing threat to the region, to the United States, and to our partners worldwide. We will continue to use all of our tools to counteract Iran’s ballistic missile program and support for terrorism, including through sanctions.” (US Department of the Treasury, 2016)

Pada Mei 2016, Anggota DPR dan Senat (*House and Senate*) menyusun sanksi baru, sekali lagi dengan alasan yang sama yaitu terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan program senjata rudal. Wacana sanksi tersebut tetap disusun bahkan jika pejabat pemerintahan Obama mengatakan mereka akan menentang sanksi jika hal tersebut dapat merusak Kesepakatan Nuklir (JCPOA). (Zengerle, 2016; Saïd, 2016)

2.3 Respons AS di bawah Administrasi Trump

Kekhawatiran yang menjadi polemik dalam JCPOA adalah bahwa Iran akan menggunakan keringanan sanksi untuk membangkitkan kembali ekonominya. Iran dianggap tidak mungkin melepaskan status hegemon regionalnya sekalipun Iran ingin memprioritaskan manfaat ekonomi dari perdagangan minyak dalam jangka pendek, perdagangan ini kemungkinan besar akan dieksploitasi untuk kepentingan politik dalam jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, Iran juga berhasil untuk tetap menjaga program nuklirnya pada tingkat yang tinggi sehingga kemudian membuat JCPOA berjalan tidak seimbang. Iran terlihat sebagai pihak yang lebih unggul dan diuntungkan sebab setelah JCPOA berakhir, negara tersebut berpotensi untuk mendapatkan senjata pemusnah masal (WMD) dan pada saat itu, ekonominya akan berada dalam kondisi yang lebih baik dan pengaruh regionalnya bahkan lebih besar sehingga kesepakatan itu pada akhirnya akan menguntungkan Iran secara sepihak.

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 19 September 2017, Presiden Trump mengatakan:

“We cannot let a murderous regime continue these destabilizing activities while building dangerous missiles, and we cannot abide by an agreement if it provides cover for the eventual construction of a nuclear program. The Iran Deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don’t think you’ve heard the last of it, believe me.” (White House Office of the Press Secretary, 2017)

AS pada bulan Agustus 2017 menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran dengan anggapan bahwa Iran terlibat mendukung kelompok militan dan mengembangkan rudal balistik yang melanggar ketentuan kesepakatan nuklir dan resolusi PBB. Sanksi tersebut dianggap Iran sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan, Iran justru merespons balik dengan menyusun RUU peningkatan anggaran pengembangan rudal sebagai isyarat bahwa mereka akan tetap mengembangkan rudal mereka, tidak peduli terhadap ancaman dan sanksi yang dijatuhkan AS. (Suastha, 2017)

Pada 13 Oktober 2017, Presiden Trump mengumumkan strategi baru AS terhadap Iran, menyusul tinjauan kebijakan enam bulan (*six-month policy review*). Presiden mengemukakan kemungkinan bahwa ia dapat menghentikan partisipasi AS dalam JCPOA jika kondisi tertentu tidak terpenuhi.

Trump menyatakan bahwa Kesepakatan Iran seharusnya berkontribusi pada perdamaian dan keamanan regional bahkan internasional. Bagi Trump AS telah mematuhi komitmennya tetapi rezim Iran masih tetap melakukan tindakan-tindakan yang mendestabilisasi kawasan Timur Tengah dengan memicu konflik, terror dan kekacauan. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintahan Trump bersama Kongres dan sekutu berupaya untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam kesepakatan sehingga Iran tidak lagi dapat mengancam dunia dengan senjata nuklir. Jika upaya tersebut tidak menghasilkan solusi maka AS menyatakan JCPOA akan berakhir, dan Trump sebagai presiden dapat melakukan pembatalan partisipasi kapan pun ia ingin.

Ketika AS keluar dari JCPOA, Trump menyatakan bahwa akan ada upaya bersama yang dilakukan dengan sekutu untuk menemukan solusi yang tepat, komprehensif, dan berkesinambungan untuk mengatasi ancaman nuklir Iran. Dalam solusi tersebut termasuk upaya untuk menghilangkan ancaman program rudal balistik Iran, menghentikan kegiatan terorisnya di seluruh dunia dan kegiatannya yang menimbulkan ancaman di Timur Tengah. (White House Office of the Press Secretary, 2017)

Pada 12 Januari 2018, Presiden Trump kembali mengancam akan menarik Amerika Serikat dari JCPOA kecuali Kongres dan sekutu Eropa memperbaiki kelemahan yang ada dalam kesepakatan nuklir Iran. Trump mengidentifikasi perbaikan dalam hal yang meliputi :

1. Persyaratan bahwa Iran mengizinkan inspeksi langsung di semua lokasi yang diminta oleh penyidik internasional;
2. Memastikan bahwa Iran tidak pernah lagi memiliki senjata nuklir;
3. Penghapusan tanggal kedaluwarsa untuk pembatasan nuklir JCPOA di Iran; dan
4. Menekan pengembangan dan pengujian rudal Iran dengan sanksi berat

Setelah pernyataan 12 Januari 2018, Presiden menggantikan Sekretaris Negara Rex Tillerson dan Penasihat Keamanan Nasional H.R McMaster dengan pejabat yang telah mengkritik JCPOA. Sekretaris Negara Mike Pompeo, dilantik pada 26 April 2018, dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton diangkat pada 9 April 2018, sebelum menjabat posisi tersebut keduanya pernah berdebat untuk mendukung aksi militer terhadap program nuklir Iran dukungan atas upaya AS untuk mengubah rezim Iran.

Tillerson setelah turun dari jabatannya membuat pernyataan bahwa sebenarnya dia tidak mengharapkan AS meninggalkan kesepakatan nuklir tetapi Presiden AS harus membuat keputusan tersebut dan pada akhirnya, itulah yang ingin dia lakukan. (McLaughlin, 2018)

Penasihat Keamanan Nasional AS, McMaster juga digantikan posisinya sebab memiliki pandangan yang berbeda dengan Trump terkait JCPOA.

“McMaster was said to be forthright in arguing that President Trump should not scrap the Obama-era nuclear agreement with Iran”.
(bbc.com, 2018)

Jelas dalam administrasinya terjadi pro dan kontra terkait keinginan Trump untuk mengakhiri keikutsertaannya dalam JCPOA. Respons yang berbeda tidak hanya muncul dari lingkaran pemerintahan namun di luar itu beberapa petinggi dari kalangan militer juga menyuarakan hal yang berbeda

terkait keputusan Trump. Pada akhirnya tanggal 8 Mei 2018, Trump tetap pada pendiriannya dan mengumumkan bahwa AS akan berhenti menerapkan JCPOA, AS akan menggunakan mekanisme penerapan kembali sanksi yang ditangguhkan untuk melaksanakan penarikan AS dari kesepakatan tersebut. Penarikan AS dari JCPOA kemungkinan akan memiliki implikasi yang signifikan untuk kebijakan AS di wilayah tersebut.

JCPOA tidak secara jelas memberikan kesempatan bagi pihak mana pun yang terlibat dalam perjanjian untuk "menarik diri" atau keluar dari kesepakatan. Meskipun Eropa dan penandatangan lainnya berpendapat bahwa Resolusi 2231 membuat perjanjian mengikat semua pihak di bawah Piagam PBB, pejabat Administrasi Obama menegaskan bahwa JCPOA adalah komitmen politik yang tidak mengikat, dan pejabat Administrasi Trump melanjutkan pernyataan itu. (Katzman, et al., 2018)

Sebagaimana pernyataan Presiden Trump pada Oktober 2017 dan Januari 2018, Trump memiliki wewenang untuk menghentikan AS dari keikutsertaan dalam mengimplementasikan JCPOA. Trump berwenang untuk memberlakukan kembali semua atau sebagian sanksi AS yang telah dicabut atau ditangguhkan, Trump juga memiliki kewenangan untuk mengembalikan sanksi yang diberlakukan oleh Pemerintah Eksekutif, dan untuk mendesain ulang entitas sanksi yang tidak termasuk dalam sanksi sebelumnya termasuk ekonomi sipil Iran, seperti bank, perusahaan perkapalan, entitas asuransi, produsen sipil, dan entitas terkait energi. (Katzman, et al., 2018)

Keputusan AS untuk tidak lagi menerapkan JCPOA mengindikasikan bahwa Trump akan menggunakan semua opsi untuk memberlakukan kembali semua sanksi yang sebelumnya telah dicabut atau ditangguhkan. Keputusan tersebut mendapatkan reaksi secara global baik berupa dukungan ataupun kecaman, keputusan AS setidaknya mendapatkan dukungan dari negara-negara yang berada di pihak yang beranggapan bahwa Iran adalah ancaman utama bagi negara mereka, seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Di sisi lain pengumuman penarikan diri AS mendapat kecaman dari para Pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris serta Uni Eropa yang secara

kolektif mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan "penyesalan" atas keputusan tersebut. Para pemimpin Eropa menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada JCPOA yang dianggap sebagai hal yang penting bagi keamanan bersama, bagi mereka JCPOA merupakan sebuah komitmen Internasional yang bersifat mengikat dibawah resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB . (Katzman, et al., 2018)

Reaksi Eropa menunjukkan kekecewaan atas kegagalan upaya mereka untuk mengatasi tuntutan Trump. Sejak pidato Presiden Trump 13 Oktober 2017, Inggris, Prancis, dan Jerman mengadakan berbagai pertemuan dengan pejabat Departemen Luar Negeri AS untuk membahas langkah-langkah potensial yang dapat memenuhi tuntutan Trump.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel masing-masing bertemu dengan Presiden Trump di Washington, menyatakan dukungan untuk bekerja dengan Amerika Serikat terkait penambahan ketentuan JCPOA, atau aksi bersama AS-Eropa lainnya, yang akan membahas berakhirnya pembatasan nuklir, kegiatan regional Iran, dan program rudal balistik Iran. Namun, tidak ada perjanjian yang tegas yang diumumkan selama kunjungan kepemimpinan Eropa. Para pemimpin Eropa mengindikasikan bahwa tidak bijaksana mengambil risiko jatuhnya perjanjian tanpa ada alternatif yang jelas, dan mereka bermaksud untuk terus mengimplementasikan JCPOA bahkan jika Presiden Trump berhenti untuk mengimplementasikannya. (Katzman, et al., 2018)

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS dalam briefing wartawan setelah pengumuman presiden 8 Mei menyatakan :

“The President made clear on January 12th that he was giving a certain number of months to try to—for—try to get a supplemental agreement with the E3 (Britain, France, and Germany). We didn’t get there. We got close. We made a—we had movement, a ton of good progress, which will not be wasted, but we didn’t get there....” (U.S. Department of State, 2018)

Keputusan AS keluar dari JCPOA tentu menarik perhatian dan respons dari negara yang menjadi sasaran kesepakatan yaitu Iran. Presiden Iran Hassan Rouhani dengan cepat bereaksi terhadap pengumuman penarikan diri AS dari JCPOA, Rouhani menyatakan bahwa Iran akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang masih tersisa untuk menjaga JCPOA agar tetap utuh. Iran akan terus menerapkan komitmennya selama Iran memperoleh manfaat ekonomi dari perjanjian tersebut, sebuah ancaman implisit bahwa Iran mungkin akan keluar dari JCPOA jika sanksi yang diterapkan kembali oleh AS merusak ekonominya secara signifikan.

"... Iran telah menyatakan bahwa mereka akan memperlakukan reintroduksi atau reimposisi sanksi yang ditentukan dalam Lampiran II, atau penerapan sanksi baru terkait nuklir, sebagai alasan untuk berhenti menjalankan komitmennya berdasarkan JCPOA ini secara keseluruhan atau sebagian." Paragraf 26 JCPOA

Pada saat yang sama, Rouhani juga menginstruksikan para pejabat program nuklir Iran untuk bersiap memulai kembali aspek-aspek yang ditangguhkan dari program nuklir Iran jika perjanjian itu benar-benar tidak dapat lagi dipertahankan. Para pejabat Iran konsisten dengan pernyataan mereka bahwa Iran tidak akan menegosiasikan ulang JCPOA dalam situasi apa pun. Iran berpendapat bahwa tidak ada tekanan AS atau internasional yang bisa membuat Iran menyerahkan haknya untuk memiliki program nuklir sipil atau program rudal balistik yang bagi Iran adalah kebutuhan untuk mempertahankan diri. Pada 9 Mei, anggota parlemen Iran membakar salinan JCPOA dan meneriakkan slogan-slogan anti-AS di parlemen Iran untuk mengekspresikan penentangan terhadap keputusan AS (Katzman, et al., 2018)